

## WAWASAN KEBANGSAAN PRASYARAT TERJAGANYA PERSATUAN-KESATUAN BANGSA DAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

**E. Imam Maksudi**

Koordinator Tenaga Profesional Lemhannas Republik Indonesia

Email: imamaksudi45@gmail.com

### ABSTRAK

“NKRI harga mati” adalah pilihan final yang tidak ingin diubah lagi dengan alasan dan cara apa pun. Semboyan ini juga mengandung semangat patriotik untuk tetap bersatu dan siap mempertahankan NKRI dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, setiap WNI harus memiliki Wawasan Kebangsaan yang utuh, satu dan benar untuk menggapai cita-cita dan tujuan nasional kita berbangsa dan bernegara atas dasar Pancasila dan UUD 1945, dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika, dan hidup dalam keutuhan NKRI. Pemahaman yang utuh, satu dan benar tentang Wawasan Kebangsaan ini akan memungkinkan kita menjawab persoalan bangsa di era globalisasi ini dan membangun kehidupan bersama secara harmoni. Disamping dampak positif, globalisasi juga membawa dampak negatif, yakni keterbukaan dan kebebasan yang melanggar norma-norma sosial dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dengan demikian perlu Wawasan Kebangsaan yang utuh, satu dan benar demi mengantisipasi dan mencegah sejak dini datangnya bahaya yang mengancam kehidupan berbangsa dan keutuhan NKRI.

**Kata Kunci:** harga mati, semangat patriotik, tetap bersatu, globalisasi, dampak positif, dampak negatif, kehidupan berbangsa, keutuhan NKRI

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara merdeka dan berdaulat memang sejak awal mula dibangun berdasarkan kesepakatan, atau konsensus bersama oleh segenap komponen bangsa ini. Kesepakatan untuk menjadikan seluruh wilayah Negara sebagai *ruang hidup* bersama. Dan, bahwa sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Bab I, Pasal 1 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), merupakan sebuah pilihan yang didasari oleh kesadaran akan pentingnya membangun negara modern, serta dengan kesadaran tentang realita kehidupan masyarakatnya yang serba ragam, dan mendiami berbagai wilayah yang secara geografik saling ter-pisah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah *Final* atau *NKRI Harga Mati*, seperti yang sering digemakan lewat yel-yel penyemangat, adalah dalam pengertian sebagai sebuah pilihan yang tak hendak diubah dengan alasan apa pun, atau dengan cara apa pun. Di dalam pengertian tersebut terkandung pula semangat patriotik untuk tetap hidup bersatu, serta siap mempertahankan keberadaan NKRI, dengan segala konsekuensinya.

Memahami makna NKRI tidak mungkin dipisahkan dari pemahaman kita tentang Wawasan Kebangsaan secara utuh. Justru di sinilah sesungguhnya letak permasalahan bangsa ini yaitu, sudahkah sebagai bangsa yang telah merdeka selama 77 tahun ini kita benar-benar memiliki kesamaan di dalam mempersepsikan makna kebangsaan Indonesia. Atau dengan perkataan lain, sudahkah kita memiliki Wawasan Kebangsaan yang satu, benar, dan utuh. Karena hanya dengan pemahaman tentang Wawasan

Kebangsaan yang sedemikian itulah kita akan diantar kepada kesadaran, tidak hanya pada makna persatuan di dalam realitas keragaman, melainkan juga pada kesadaran terhadap makna Cita-cita serta Tujuan Nasional kita bersama. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara Indonesia akan semakin menyadari arti berbangsa dan bernegara yang berdasarkan falsafah Pancasila dan konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika, serta hidup bersama di dalam satu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan Indonesia sekaligus akan mampu menjawab berbagai permasalahan bangsa, serta membangun suasana kehidupan bersama secara harmoni dan saling menguatkan di antara segenap elemen bangsa. Kesemuanya itu diarahkan demi tetap dapat dipertahankannya Persatuan dan Kesatuan bangsa serta integritas NKRI.

Perkembangan dunia secara menyeluruh, yang juga dikenal dengan globalisasi, telah menyentuh segenap aspek kehidupan umat manusia. Globalisasi yang dikuatkan oleh kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) memberi pengaruh sangat kuat terhadap kehidupan manusia pada umumnya. Keterbukaan dan kebebasan yang menjadi ciri sekaligus tuntutan dalam globalisasi ternyata telah mengubah pola hidup baik pada setiap individu maupun dalam hubungan sosial yang melintasi berbagai keragaman budaya yang ada.

Suasana kehidupan yang semakin terbuka dan bebas telah membawa pengaruh positif, yaitu memberikan ruang yang cukup bagi berkembangnya aspirasi masyarakat yang dapat dijadikan wahana di dalam membangun solidaritas sosial. Namun sebaliknya, apabila kebebasan dan keterbukaan berkembang secara tak terkendali justru akan dapat menguatkan nilai-nilai individualistik sebagai benih berkembangnya sentimen-sentimen primordial.

Permasalahan yang cukup mendasar kini adalah, seberapa jauhkah keterbukaan dan kebebasan itu melanggar norma-norma sosial sehingga dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Karena itu, perlu kiranya memetakan berbagai permasalahan bangsa ini, terutama yang terkait dengan kadar pemahamannya terhadap Wawasan Kebangsaan Indonesia. Agar sedini mungkin dapat diantisipasi dan berusaha dapat dicegah segala kemungkinan bahaya yang dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Wawasan Kebangsaan Indonesia**

Wawasan Kebangsaan Indonesia tumbuh dari kesadaran kebangsaan, yaitu kesadaran untuk membangun dan mengembangkan diri sebagai satu bangsa yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan yang berkepanjangan, disamping kehendak untuk bebas membangun interaksi antar bangsa dalam prinsip kesetaraan. Wawasan Kebangsaan yang kemudian menjadi wawasan Nasional bangsa Indonesia, dapat dirumuskan batasannya sebagai: Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sesuai dengan falsafah (Pancasila), cita-cita dan tujuan nasionalnya serta kemungkinan penyesuaiannya di dunia yang serba berubah/dinamis. Sebagai sebuah kesadaran, wawasan kebangsaan memang seharusnya dijaga dan dipelihara agar kehidupan kebangsaan tetap berkembang ke arah pencapaian cita-cita dan tujuan nasional yang telah ditetapkan sejak semula. Hal inilah yang seharusnya dipahami oleh segenap elemen bangsa, mengingat bahwa pada dasarnya suatu bangsa tidak memiliki sifat yang tetap. Seperti dikatakan Ernest Renan bahwa suatu bangsa bukanlah suatu

fakta, melainkan sebuah *"status nascendi"* yang permanen atau langgeng. Dalam kenyataan-nya, bangsa selalu bersifat *"in potensia"*, tidak pernah *"in actu"*. Istilah bangsa bukan menyatakan keadaan, melainkan satu gerakan, satu kemauan bersama, dan satu usaha kolektif.

Mengikut penjelasan di atas dapat dipahami bilamana Wawasan Kebangsaan Indonesia harus senantiasa disegarkan agar tidak terbelokkan arah dan tujuan hidup membangsa ini. Bersamaan dengan hal tersebut Wawasan Kebangsaan yang telah tumbuh dari kesadaran kebangsaan itu tidak akan terhapus dari kesadaran kolektif bangsa Indonesia, demi semakin menguatkan persatuan bangsa serta tetap tegak-utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Benih wawasan kebangsaan Indonesia pada dasarnya telah tersemaikan seiring dengan tumbuh dan makin menguatnya rasa dan kesadaran untuk hidup membangsa, lepas dari kekuasaan kaum kolonial yang membelenggu kebebasan dan menyengsarakan hidup rakyat yang terjajah. Kata-kata Bung Karno berikut amat menggugah kesadaran kebangsaan, yaitu:

*"Setahap demi setahap aku menjadi seorang patriot yang tangguh, yang menyadari bahwa seorang pemuda Indonesia tidak boleh lagi larut dengan kesenangan dengan melarikan diri ke dalam dunia khayalan. Aku menghadapi kenyataan bahwa negeriku miskin, malang dan terhinakan."*

Realisasi ide kebangsaan dimaksud kemudian dinyatakan melalui gerakan Boedi Oetomo, 20 Mei 1908, yang dipelopori atau dirintis oleh kaum muda terpelajar dan tercerahkan. Karena itu *Angkatan 1908* ini dikenal dengan sebutan Angkatan *"Perintis"*. Tonggak sejarah ini kemudian kita kenal sebagai Kebangkitan Nasional. Makin menguatnya kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat di seluruh persada Nusantara, kemudian menumbuhkan tekad bersama untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan. Wujud dari tekad bersama tersebut ditegaskan ke dalam sebuah komitmen kebangsaan, yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sebuah ikrar atau janji untuk menjadi Satu bangsa, dalam Satu kesatuan Tanah Tumpah-Darah, serta Menjunjung Bahasa Persatuan, Indonesia. Keberanian dan ketegasan sikap bangsa inilah yang menjadi alasan untuk mematri *Angkatan 1928* ini kemudian sebagai Angkatan *"Penegas"*.

Penegasan sikap BERSATU telah membangkitkan semangat perjuangan di setiap komponen bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Semangat juang yang sekaligus juga menumbuhkan solidaritas sosial di kalangan rakyat merupakan kunci terhimpunnya potensi bangsa menjadi kekuatan yang tak dapat diperhitungkan, yang pada akhirnya mampu mengusir kaum penjajah dari bumi Pertiwi. Rangkaian sejarah yang menggambarkan tumbuh-berkembangnya kesadaran kebangsaan inilah yang kemudian menjadi dasar tumbuhnya wawasan kebangsaan, atau wawasan nasionalnya bangsa Indonesia.

Dengan wawasan kebangsaan itu bangsa Indonesia memiliki pandangan atau persepsi tentang dirinya secara utuh, yaitu realitas dirinya sebagai bangsa yang *multi kultur* (beragam adat dan budaya) serta berada dalam ruang hidup yang secara geografik terpisah-pisah, dan yang utama adalah memiliki sikap dan semangat untuk senantiasa bersatu di dalam menghadapi dan mengatasi segala hakikat tantangan bersama. Di samping itu juga memiliki satu kesatuan pandangan tentang segala kekuatan dan kelemahan yang ada, serta pandangan terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berkembang dan berpengaruh pada dinamika kehidupannya. Berdasarkan wawasan nasional itu pula bangsa yang bersangkutan akan mengarahkan segala upaya

untuk mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahannya demi mencapai tujuan serta mewujudkan cita-citanya.

Disebut sebagai rasa kebangsaan karena lahir dari rasa keprihatinan diri (terutama oleh sekelompok kaum terpelajar), yang kemudian *memimpikan* satu bangsa (*imagine community*) yang akan menjadi wahana kebebasan. Adapun kesadaran kebangsaan merupakan cermin kesadaran akan realitas kondisi sosial dan geografik yang secara obyektif menjadi ciri masyarakat di wilayah Nusantara. Karena itu, kesadaran kebangsaan juga menjadi wawasan yang ingin menyatukan segala bentuk dan orientasi perjuangan pada masa itu, menjadi satu gerakan perjuangan dengan satu orientasi, yaitu kebangsaan Indonesia. Dengan demikian perlu dipahami bahwa Wawasan Nasional Indonesia pada dasarnya merupakan wawasan kebangsaan yang tidak dilandasi oleh orientasi daerah, suku, keturunan, ataupun keagamaan. Kebangsaan Indonesia tidaklah mempunyai konotasi etnis, rasial biologis, status sosial ataupun keagamaan. Dan, tidak ada lagi dikotomi *mayoritas* – *minoritas* dalam negara Indonesia yang merdeka (Ajaran Ki Hajar Dewantara). Ajaran tersebut di atas menegaskan bahwa dengan memahami Wawasan Kebangsaan secara utuh akan membangun sikap, *ke dalam*, saling percaya di kalangan segenap komponen bangsa sehingga memperkuat persatuan bangsa. Sedangkan *ke luar*, menghadapi globalisasi dengan ciri kebebasan dan keterbukaannya, Wawasan Kebangsaan menjadi wawasan terbuka terhadap perkembangan dunia sehingga dapat membangun sikap adaptif dan dialogis.

## 2. Masalah Bangsa Sebagai Tantangan

Seperti telah diungkapkan pada bagian terdahulu, bahwa dengan Wawasan Kebangsaan kita tidak hanya memahami keselarasan kehidupan bangsa yang memiliki ciri dan karakter budaya yang amat beragam. Melainkan dengan Wawasan Kebangsaan kita sekaligus diajak untuk memandang dan memperlakukan wilayah negara Indonesia yang merupakan kepulauan dengan ribuan pulau ini, sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Dalam lingkup memahami Wawasan Kebangsaan dapat dicermati beberapa permasalahan sebagai faktor yang secara umum maupun di dalam kehidupan menggerja, berpengaruh terhadap pudarnya nilai-nilai kebangsaan, yaitu:

### 1. Faktor dari Luar

Globalisasi, sebuah keniscayaan yang tak mungkin terhindari telah membawa perubahan nilai-nilai budaya baru yang berciri mondial. Masuknya nilai-nilai budaya baru sekaligus membawa pengaruh yang sangat berarti bagi suasana kehidupan nasional, baik yang bernilai positif maupun yang negatif.

#### a. Pengaruh Positif

Globalisasi yang dicirikan sebagai dunia yang tanpa batas, dapat menciptakan:

- 1) Iklim kondusif bagi setiap upaya mencapai tujuan.
- 2) Suasana kehidupan yang semakin dinamis dan terbuka sehingga dapat mendorong pengembangan wawasan, di samping pengembangan aspirasi dan kreativitas individu maupun masyarakat.
- 3) Mendorong terlaksananya tata kelola negara yang makin demokratis.

#### b. Pengaruh Negatif

Bersamaan dengan berkembangnya isu-isu strategis, seperti kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), demokrasi di era *post truth*, perubahan iklim dan kerusakan alam, serta perkembangan geopolitik dunia dan kawasan yang berdampak pada krisis pangan dan energi dunia, memberi pengaruh kepada perubahan pada suasana kehidupan nasional, seperti:

- 1) Demokrasi mejadi sebatas kebebasan tanpa landasan nilai keadaban.
- 2) Orientasi ke masa depan tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai sejarah kebangsaan sebagai kekuatan bangsa untuk dihadapkan kepada berbagai hakikat tantangan.
- 3) Terganggunya soliditas masyarakat oleh maraknya isu-isu provokatif, terutama dengan latar belakang SARA.
- 4) Gaya hidup masyarakat cenderung berkembang ke arah individualistik, eksklusif, hedonis dan konsumistis.

## 2. Faktor dari Dalam

Perlu disadari pula bahwa di dalam suasana membangun kehidupan bersama sebagai satu bangsa dalam satu Negara Kesatuan, Indonesia, masyarakat belum dapat melepaskan beberapa kelemahan diri, yang merupakan faktor penghambat terwujudnya soliditas dalam kebersamaan, seperti:

- a. *Egoisme*, yang masih menggejala di banyak aspek kehidupan bangsa, yang juga menyangkut hubungan kelembagaan, baik antar Lembaga pemerintahan, antar daerah, antar golongan dan sebagainya.

Berbagai wujud egoisme diatas tercermin pada lemahnya aspek kordinasi serta sinergi di dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan nasional maupun daerah, yang sudah tentu merugikan rakyat. Sikap egois apabila menyangkut kelompok atau golongan akan menipiskan kadar toleransi dan melemahkan kepedulian terhadap sesama, yang merupakan wahana bagi terwujudnya kerukunan hidup masyarakat. Sikap egoisme kelompok atau golongan juga menjadi faktor pemicu segala bentuk konflik massal yang dapat mengganggu upaya memelihara persatuan bangsa.

- b. *Idealisme kebangsaan* yang semakin terkikis, nampak dari semakin menurunnya penghargaan serta kebanggaan terhadap nilai-nilai dasar atau pun faktor-faktor perekat bangsa.

Semakin kurang dipedulikannya kepentingan bersama, terutama bila hal itu menyangkut hak atau kepentingan masyarakat kecil dan lemah. Berbagai kasus korupsi dan suap-menyuap di kalangan pimpinan dan kaum elit lainnya memberi gambaran tentang hal dimaksud. Di sisi lain masih terjadi tindakan penistaan terhadap kelompok minoritas atas dasar pembenaran sepihak oleh kelompok masyarakat tertentu tanpa perlindungan yang berarti dari pihak negara. Bahkan ada sekelompok masyarakat yang menganggap multikulturalis sebagai ancaman yang mesti ditolak/diperangi. Penggunaan bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional yang seharusnya mendapat perlakuan terhormat di ranah publik sudah semakin diabaikan. Kata '*menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*' (*Sumpah Pemuda 1928*), seolah tidak lagi bermakna. Kita sudah mulai lupa bahwa bahasa menandakan budaya, dan budaya membentuk kepribadian. Akankah bangsa kita menjadi bangsa tanpa jati diri, yang hidupnya selalu terombang-ambing dibawah pengaruh budaya asing.

- c. *Disiplin yang rendah* masih menjadi gambaran umum masyarakat kita, tak terkecuali di kalangan kaum terpelajar.

Disiplin adalah ekspresi dari sikap mental serta menggambarkan kualitas moral seseorang. Karena itu, kadar disiplin yang rendah adalah cerminan dari lemahnya sikap mental serta rendahnya kualitas moral. Hal tersebut merupakan faktor utama penyebab tidak efisiennya semua pekerjaan, yang juga menuntut biaya tinggi. Di samping itu, rendahnya disiplin menjadi penyebab rusaknya lingkungan alam maupun sosial. Kenyataan ini akan semakin parah apabila faktor-faktor kelemahan di



bidang penegakan hukum serta pelayanan publik tidak diatasi secara tegas dan terstruktur. Penegakan hukum dan pelayanan publik merupakan dua faktor utama yang menggambarkan kehadiran negara, sebagai wujud pelaksanaan misi negara sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yaitu *"melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia .... "*

d. Tantangan Dalam Kehidupan Menggereja:

- 1) Dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terkait dengan dinamika politik, Gereja hadir ke dalam suasana kehidupan yang sarat dengan berbagai kepentingan yang saling tarik-menarik dan saling berbenturan. Dalam kepentingan politik praktis, keterlibatan Gereja bisa dianggap sebagai 'batu sandungan' bagi pihak-pihak yang ingin berkuasa, atau juga bagi mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan. Dalam situasi sedemikian, hendaknya Gereja dapat semakin memahami posisi serta peran didalam lingkup kemasyarakatan dan kebangsaannya.
- 2) Terkait dengan sejarah kehadiran Gereja Katolik di bumi Nusantara. Bahwa hingga sekarang masih terdapat anggapan di sebagian kalangan masyarakat yang memandang Gereja sebagai pewujudan budaya Barat. Hal mana sering dikaitkan dengan hadirnya kekuasaan penjajahan bangsa-bangsa Eropa pada masa lalu. Persepsi masyarakat semacam ini seringkali diperkuat oleh penampilan gereja, dalam hal ini arsitektur bangunan, yang megah namun kurang selaras dengan suasana lingkungan setempat.
- 3) Umat seringkali masih dipengaruhi oleh prasangka buruk terhadap lingkungan sosialnya. Hal mana akan berpengaruh terhadap kurang optimalnya upaya sosialisasi diri yang seharusnya menjadi wujud keputusan Gereja di tengah masyarakat.

Muara dari segenap permasalahan bangsa yang tergambarkan di atas menjadi wahana semakin menurunnya kadar kepercayaan masyarakat (*social trust*), baik di antara komponen masyarakat itu sendiri maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Tidak mengherankan apabila konflik massa semakin mudah terjadi di berbagai kalangan serta melibatkan segala generasi, sekalipun hanya terpicu oleh permasalahan yang amat sepele. Masyarakat nampak seperti telah kehilangan cita-rasa persaudaraan atau semangat kekeluargaan sebagai satu bangsa. Masyarakat juga semakin kehilangan orientasi ke masa depan di dalam mengejar tujuan hidup berbangsa dan bernegara, maupun di dalam mewujudkan cita-cita nasional. Pertanyaan, masih sah (*valid*)-kah Wawasan Kebangsaan bila dihadapkan kepada upaya menyejahterakan kehidupan bangsa maupun demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan kesatuan negara Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Memantapkan Wawasan Kebangsaan Untuk Mengatasi Tantangan/Permasalahan Bangsa

Ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan akan memberi pengaruh amat mendasar bagi segenap tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semakin diabaikannya nilai-nilai kebangsaan, secara perlahan namun pasti, akan menghancurkan persatuan dan kesatuan nasional, yang berarti akhir dari sejarah kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar terhindar dari keadaan yang tentu tidak kita kehendaki bersama, karenanya amat perlu memantapkan kembali

Wawasan Kebangsaan kedalam sanubari segenap warga bangsa Indonesia, tanpa kecuali. Dalam upaya memantapkan Wawasan Kebangsaan, hal yang mesti dipahami adalah:

**2. Makna *Bhineka Tunggal Ika* (Berbedabeda namun Satu) yang menjadi ciri, sekaligus juga ajaran moral masyarakat Indonesia.**

Ke-Tunggal-an hendaknya dipahami bukan sebagai niat *menyatukan* atau *menyamakan wujud* yang berbeda. Seperti halnya wujud ciptaan Yang Maha Kuasa yang senantiasa berbeda, dan tidak untuk disamakan. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menasihatkan: "*Janganlah menyatukan apa yang **tidak dapat** disatukan, janganlah menyatukan apa yang **tidak perlu** disatukan, kesatuan dalam dasar dan asas, dalam pokok-pokoknya cukuplah, bahkan itulah satu-satunya syarat untuk dapat menggalang persatuan dan kesatuan yang kukuh dan abadi*". Ke-Tunggal-an melainkan bermakna menyelaraskan, atau menjadikan segala yang berbeda itu dapat dirangkum ke dalam satu tatanan kehidupan yang serba selaras (harmonis).

**3. Hal lain yang penting adalah memahami dengan benar makna *Cita-cita* serta *Tujuan Nasional*.**

Memantapkan Wawasan Kebangsaan diwujudkan dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang tetap diarahkan kepada pewujudan Cita-cita Nasional sebagai *visi* bangsa, serta pencapaian Tujuan Nasional yang merupakan *misi* Negara (alinea II & IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sebagai *visi* bangsa, Cita-cita Nasional merupakan orientasi masa depan bangsa yang menjadi sasaran bagi setiap upaya pembangunan bangsa dan negara. Sedangkan Tujuan Nasional adalah *misi* yang diamanatkan oleh segenap rakyat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh setiap aparatur penyelenggara negara. Dalam konteks mengatasi permasalahan bangsa dalam kerangka memantapkan Wawasan Kebangsaan, perlu interpretasi yang lebih konkrit terhadap Cita-cita maupun Tujuan Nasional, masing-masing sebagai berikut:

**4. Cita-cita Nasional:**

- a. **Merdeka**, dalam arti bebas menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; bebas dari segala bentuk perhambaan dan diskriminasi baik sebagai subyek maupun obyek.
- b. **Bersatu**, dalam arti makin tumbuh berkembangnya solidaritas sosial guna mewujudkan kekuatan bersama di dalam menyukkseskan pembangunan serta mengatasi setiap hakekat tantangan yang ada.
- c. **Berdaulat**, dalam arti rakyat adalah subyek pemilik hak dan kuasa atas wilayah dengan segala isinya, yang karenanya harus dimampukan/diberdayakan dalam menjalankan kewajibannya serta dijamin dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara.
- d. **Adil**, dalam arti makin rendahnya tingkat kesenjangan sosial di seluruh wilayah nasional.
- e. **Makmur**, dalam arti makin tercukupinya kebutuhan hidup rakyat secara layak di seluruh daerah, hingga makin meningkat pula martabat bangsa.

**5. Tujuan Nasional:**

Ditinjau dari sisi penyelenggaraan Negara, mengatasi setiap permasalahan bangsa merupakan wujud pelaksanaan tanggungjawab Negara di dalam:

- a. Melindungi hak dan kepentingan seluruh rakyat serta menjaga tetap tegak-utuhnya integritas wilayah negara, demi terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang tertib serta memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi (*misi keamanan*).
- b. Menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, berimbang dan proporsional untuk menghilangkan kesenjangan sosial yang terlalu lebar di seluruh wilayah nasional; serta meningkatkan daya kritis yang rasional disertai nasionalisme yang tinggi (*misi kesejahteraan*).
- c. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya interaksi sosial yang semakin intensif dan membangun, baik bagi kepentingan nasional maupun dalam menjalin hubungan antar bangsa (*misi pembentukan lingkungan*).
- d. Perlu dipahami dengan seksama bahwa makna kebangsaan Indonesia, tidak termasuk ke dalam pengertian kebangsaan yang *alami*, seperti kebangsaan Korea dan Jerman yang dibangun berdasar atas kesamaan *etnik* dan *bahasa*.

Jenis kebangsaan seperti ini rawan menjadi *chauvinis* dan *agresif*. Kebangsaan Indonesia, adalah merupakan kebangsaan *etis*. Yaitu kebangsaan yang dibangun berdasarkan cita-cita etis luhur, yang dimiliki bersama. Bung Karno, dalam sebuah pidato kenegaraan mengatakan bahwa kunci untuk mengerti mengapa Indonesia masih berdiri kokoh, yaitu bahwa kebangsaan Indonesia berwujud perasaan kebersamaan yang lahir dari pengalaman sejarah bersama. Hal tersebut didasari oleh pengalaman bersama akan ketertindasan dan keterhinaan karena keadaan terjajah sehingga melahirkan solidaritas bangsa yang melampaui perbedaan suku, etnis dan agama. Bahkan 17 tahun sebelum ada negara Indonesia, lewat Sum-pah Pemuda, 28 Oktober 1928, sudah berani menegaskan: "*Kami Bangsa Indonesia*."

## 6. Strategi Yang Perlu Dikembangkan

Memantapkan Wawasan Kebangsaan bagi segenap warga Negara Indonesia harus terwujud dalam instrumen penyelenggaraan pembangunan nasional dengan skala prioritas, sebagai berikut:

1. Pendidikan, formal, non-formal, dan informal di dalam ataupun di luar sekolah adalah faktor utama dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan generasi masa mendatang yang bertanggungjawab. Sistem pendidikan nasional diarahkan tidak sebatas menjadi wahana alih teknologi, melainkan lebih diseimbangkan dengan tujuan mewujudkan manusia Indonesia yang berkeadaban. Sistem pendidikan nasional hendaknya mampu melahirkan manusia Indonesia, sebagai individu yang bebas dalam arti kreatif dan inovatif mengembangkan potensi dirinya, sekaligus punya kesadaran diri sebagai insan sosial yang memiliki tanggungjawab kemasayarakatan, seperti pemahaman terhadap sejarah bangsa, realitas keanekaragaman budaya dan adat-istiadat, pengenalan wilayah negara serta kesadaran akan lingkungan alam serta etika kehidupan sosial, hendaknya ditanamkan sejak masa pra-sekolah, bahkan harus menjadi model pendidikan awal di rumah. Tak kalah pentingnya adalah sebagai patriot pembela bangsa dan negara. Untuk itu, konsep-konsep ke-Indonesia-an, bahwa masalah pendidikan nasional pada hakikatnya adalah tanggungjawab semua pihak tanpa kecuali.
2. Memantapkan kembali nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersumber pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan RI, dan Bhineka Tunggal Ika. Keempat konsensus dasar nasional tersebut di atas harus diterapkan secara taat asas (*konsekuensi*) dan '*ajeg*' (*konsisten*) sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah,



terutama bagi pembangunan karakter bangsa. Setiap aparaturnya penyelenggara negara hendaknya sadar akan tanggungjawabnya sebagai pengemban  *misi*  negara, meliputi misi  *keamanan* , misi  *kesejahteraan* , serta misi  *pembentukan lingkungan* .

3. Mengarahkan perhatian secara lebih seksama terhadap pembangunan di seluruh wilayah nasional secara merata dan berkeeseimbangan. Mengutamakan pembangunan daerah pinggiran, wilayah perbatasan maupun daerah-daerah terpencil lainnya (seperti yang sedang dijalankan saat ini). Pembangunan nasional di samping menjadi upaya untuk memenuhi dan menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, hendaknya dapat semakin memberdayakan segenap masyarakat untuk selalu bersama mengatasi berba-gai tantangan yang ada.
4. Penegakan hukum secara taat asas (*konsekuen*) dan '*ajeg*' (*konsisten*) demi terpenuhinya rasa keadilan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, serta menjamin suasana kehidupan masyarakat yang rukun dan dinamis. Perlu dipastikan agar perangkat hukum yang ada dapat menjamin hak-hak warga negara. Tak kalah pentingnya adalah, mengupayakan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menaati hukum.
5. Mengedepankan sikap keteladanan, yang menyakup tiga sisi penting, yaitu:
  - a. Memahami dan menghargai segala bentuk perbedaan yang menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - b. Memahami dan peduli akan kondisi keprihatinan rakyat, dan senantiasa merasa terpanggil untuk segera mengatasi setiap persoalan menyangkut peri kehidupan rakyat.
  - c. Tegak dan tetap konsisten dalam menjaga dan mengarahkan pembangunan sebagai wahana memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta tetap tegak utuhnya NKRI.

## 7. Mengembangkan dan Memperkuat Peran Gereja

Dari berbagai tantangan yang dapat kita pahami, dapat dilihat bagaimana seharusnya Gereja menempatkan diri serta ikut berperan membangun solidaritas sosial yang akan menjadi perekat persatuan bangsa seperti yang kita kehendaki bersama. Tentang hubungan Gereja dengan negara, perlu dikutip Statuta Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang disahkan pada bulan November 1987, pasal 3, yang berbunyi: "*Dalam terang iman Katolik Konferensi Waligereja Indonesia berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*"

Pasal tersebut diberi penjelasan sebagai berikut: "Nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti yang ada dalam Pancasila itu terdapat juga dalam ajaran Gereja. Andaikata tidak ada Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu juga sudah harus dijunjung tinggi dan diperjuangkan oleh Gereja Katolik. Dalam terang iman Katolik, Gereja menerima Pancasila. Dengan menerima Pancasila itu Gereja Katolik tidak merasa menerima tambahan beban, melainkan mendapat tambahan dukungan dan bantuan dari Negara RI. Maka, Gereja Katolik sangat menghargai Pancasila bukan karena pertimbangan taktis, melainkan karena keyakinan akan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yang perlu dihayati dan diamalkan secara terbuka, dinamis, dan kreatif dalam wawasan persatuan, kebersamaan, dan kemanusiaan yang luhur bangsa kita."

Dari keseluruhan penjelasan pasal di atas dapat dipahami bahwa antara Gereja dan negara tidak terdapat perselisihan kepentingan, tetapi memiliki kepentingan yang sama, bahkan searah di dalam membangun harkat dan martabat manusia (Indonesia). Karena itu, sudah seharusnya Gereja Katolik tidak bersikap pasif, akan tetapi berani

secara proaktif mengambil peran dalam menghadapi setiap bentuk tantangan menyangkut segenap peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun solusi yang dapat ditawarkan guna mengatasi masalah bangsa, adalah sebagai berikut:

1. Membangun sikap positif dalam menanggapi setiap aksi yang mendiskreditkan Gereja. Menghapus stereotip yang bernada buruk dari dalam pikiran umat tentang keberadaan ajaran agama lain di luar Gereja. Sebaliknya, Gereja harus mau dan mampu mengembangkan pemikiran positif untuk dapat saling memahami ajaran tentang kebaikan sebagai dasar perjuangan bersama yang bersifat lintas keyakinan, demi mengembangkan nilai-nilai moral dalam mewujudkan keadilan sosial dan kedamaian hidup bersama.
2. Mengembangkan sikap keteladanan dalam banyak hal dan berbagai kesempatan. Gereja hendaknya berada di garis depan untuk menjadi contoh atau teladan dalam hal:
  - a. Disiplin dan ketaatan hukum. Gereja harus berani menjadi pilar bagi tegaknya keadilan, dan hukum di negeri ini.
  - b. Kesederhanaan hidup serta rendah hati, dalam arti pandai menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat bangsa yang pada dasarnya masih belum mapan.
  - c. Kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan hidup di sekelilingnya. Gereja hendaknya juga pandai mengembangkan nilai-nilai budaya daerah dalam berbagai segi penampilan (menjadi Gereja yang inklusif).

### KESIMPULAN

Upaya mengatasi berbagai permasalahan bangsa hendaknya didasari oleh kesadaran untuk mengenali segala kelemahan yang ada dalam diri bangsa, terutama kelemahan di dalam memelihara suasana kehidupan yang selaras, penuh toleransi. Karena itu segala permasalahan bangsa hendaknya disikapi secara arif dan bijaksana dengan tetap berorientasi pada kepentingan menjaga suasana persatuan dan keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjamin suasana kehidupan masyarakat yang rukun-damai dan bermartabat.

Memantapkan Wawasan Kebangsaan harus dimulai dengan pemahaman yang benar dan utuh tentang makna *Bhinneka Tunggal Ika*, serta Cita-cita dan Tujuan Nasional, di samping makna kebangsaan Indonesia yang sesungguhnya. Kesemuanya itu akan membentuk kesadaran warga negara tentang pentingnya mewujudkan suasana kehidupan nasional yang harmonis, toleran dan saling menguatkan, disamping kesadaran akan tanggungjawab bersama mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Mantapnya pemahaman atas Wawasan Kebangsaan akan membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar dan kuat.

Umat/masyarakat Katolik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keutuhan masyarakat bangsa hendaknya turut terpanggil dalam tanggungjawab menjaga dan memelihara keutuhan dan kelestarian bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Segenap umat bersama dengan para *gembalanya*, hendaknya mampu berperan sebagai patriot, pelopor dalam menegaskan kembali komitmen kebangsaan Indonesia. Kesemuanya itu adalah wujud kesadaran kebangsaan yang kuat dan sekaligus kesadaran iman sebagai landasan tugas perutusan dalamewartakan kabar suka cita, kabar keselamatan yang datang dari Allah. Mewujudkan *Gereja Kebangsaan*. Dengan demikian terpenuhi pernyataan patriotik dari Mgr. Albertus Soegijapranata, "*menjadi seratus persen Katolik, dan seratus persen Indonesia.*"

*Pro ecclesia et patria.* Sekian, semoga bermanfaat. Selamat Berjuang dan Melayani.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy (2011). *Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: Yayasan Bung Karno, bekerjasama dengan PT Media Pressindo.
- Joesoef, Daoed dan Sutowo, Ponco (2017). *Nilai-nilai Keindonesiaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- KWI (2000). *Iman Katolik*, Jakarta: Penerbit Obor.
- Magnis Suseno, Frans (2021). *Demokrasi, Agama, Pancasila, Catatan Sekitar Perpolitikan Now*. Jakarta: Penerbit Buku Kom-pas.
- Marwati, DP., dan Nugraha, NS. (1984). *Sejarah Nasional Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranarkan, A.M.W. (1986). *Relevansi Ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara Dewasa Ini dan di Masa yang Akan Datang*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjana Wiyata Ta-mansiswa.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.